

Lampiran 4 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer



AKREDITASI PROGRAM STUDI

MATRIKS PENILAIAN KINERJA PROGRAM STUDI

PROGRAM DOKTOR

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFOKOM

FEBRUARI 2022

Alamat :
Jl. Damai No. 8 Warung Jati Barat (Margasatwa) Jakarta Selatan 12540
Telp (021) 78839502 | Fax (021) 78839481
e-mail : sekretariat@laminfokom.or.id



DAFTAR ISI

I	MATRIKS PENILAIAN KINERJA PROGRAM STUDI	3
II	BOBOT PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR LAM INFOKOM	45
III	BOBOT BAGIAN / KRITERIA	49
IV	PERSENTASE INPUT, PROSES, <i>OUTPUT/OUTCOME</i>	50

I. MATRIKS PENILAIAN KINERJA PROGRAM STUDI

Jenis	No. Urut	No. Butir	Bobot dari 400	Elemen Penilaian LAM	Deskriptor	Sangat baik = 4	Baik = 3	Cukup = 2	Kurang = 1
i	1	A	4	Kondisi Eksternal	Kemampuan UPPS dalam menganalisis aspek- aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan PS maupun UPPS.	UPPS mampu menganalisis aspek- aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan PS maupun UPPS dengan sangat komprehensif.	UPPS mampu menganalisis aspek- aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan PS maupun UPPS secara komprehensif.	UPPS mampu menganalisis aspek- aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan PS maupun UPPS secara cukup komprehensif.	UPPS mampu menganalisis aspek- aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan PS maupun UPPS secara kurang komprehensif.
i	2	B	4	Profil Unit Pengelola Program Studi / Analisis Internal	Kemampuan UPPS dan PS dalam menyajikan seluruh informasi secara ringkas, komprehensif, serta konsisten terhadap data dan informasi yang disampaikan pada masing- masing kriteria.	UPPS mampu menyajikan seluruh informasi secara ringkas, sangat komprehensif dan konsisten terhadap data dan informasi yang disampaikan pada masing- masing kriteria.	UPPS mampu menyajikan seluruh informasi secara ringkas, komprehensif dan konsisten terhadap data dan informasi yang disampaikan pada masing- masing kriteria.	UPPS mampu menyajikan seluruh informasi secara ringkas, cukup komprehensif dan konsisten terhadap data dan informasi yang disampaikan pada masing- masing kriteria.	UPPS mampu menyajikan seluruh informasi secara ringkas, kurang komprehensif dan konsisten terhadap data dan informasi yang disampaikan pada masing- masing kriteria.
Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi									
i	3	1.1	0,5	1.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan	1.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan,	Tersedianya rumusan VMTS UPPS dan PS yang sangat sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi	Tersedianya rumusan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program	Tersedianya rumusan VMTS UPPS dan PS yang cukup sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi	Tersedianya rumusan VMTS UPPS dan PS yang kurang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi

				Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS) UPPS dan PS.	Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup: A. Rumusan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
i	4		0,25	B. Rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS.	B. Rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS sangat memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS cukup memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Tersedianya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS kurang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
i	5		0,25	C. Rumusan visi keilmuan PS.	C. Rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level 9 jenjang PS.	Tersedianya rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara sangat jelas.	Tersedianya rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara jelas.	Tersedianya rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara cukup jelas.	Tersedianya rumusan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara kurang jelas.
p	6	1.2	0,5	1.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.	1.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup: A. Keterlaksanaan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku	Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang sangat efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sah.	Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sah.	Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang cukup efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sah.	Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang kurang efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sah.

					kepentingan internal dan eksternal.				
p	7		0,25	B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS.	B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS dengan sangat efektif dilengkapi dengan tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS dengan efektif dilengkapi dengan tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS dengan cukup efektif dilengkapi dengan tahapan yang cukup lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Keterlaksanaan strategi pencapaian VMETS UPPS dan PS dengan kurang efektif dilengkapi dengan tahapan yang kurang jelas, dokumen yang kurang lengkap dan kurang terkait pencapaian visi misi.
p	8		0,25	C. Keterlaksanaan visi keilmuan PS.	C. Keterlaksanaan visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 9.	Keterlaksanaan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Keterlaksanaan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara efektif disertai bukti yang sah.	Keterlaksanaan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Keterlaksanaan visi keilmuan PS sesuai KKNI level jenjang PS secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	9	1.3	1	1.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait VMETS UPPS dan PS.	1.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMETS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMETS UPPS dan PS.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMETS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMETS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMETS UPPS dan PS.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMETS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMETS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa

						terhadap VMTS UPPS dan PS.		terhadap VMTS UPPS dan PS.	terhadap VMTS UPPS dan PS.
p	10	1.4	0,5	1.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait VMTS UPPS dan PS.	1.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.
p	11	1.5	0,5	1.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait VMTS UPPS dan PS.	1.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, disertai bukti yang sah.
Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama									
i	12	2.1	0,5	2.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan	2.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup: A. Sistem tata pamong	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang sangat memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup:	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup: A. Sistem tata pamong	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang cukup memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup:	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang kurang memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup:

				Kerjasama terkait sistem tata pamong.	yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.	A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.	yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.	A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.	A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.
i	13		0,5	B. Ketersediaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.	B. Ketersediaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.	Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung dokumen yang diperlukan, serta bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung dokumen yang diperlukan, serta bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung dokumen yang diperlukan, serta bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung dokumen yang diperlukan, serta bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	14		0,5	C. Ketersediaan kebijakan terkait pengembangan kerjasama.	C. Ketersediaan kebijakan terkait pengembangan kerjasama.	Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kerjasama disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kerjasama disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kerjasama disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kerjasama disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	15		0,5	D. Ketersediaan fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.	D. Ketersediaan fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.	Tersedianya fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
p	16	2.2	2	2.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama terkait	2.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup: A. Kepemimpinan UPPS	Terlaksananya kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Terlaksananya kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Terlaksananya kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Terlaksananya kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.

				kepemimpinan UPPS dan PS.	dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.				
p	17		2	B. Keterlaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.	B. Keterlaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.	Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS, secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS, secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS, secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	18		2	C. Keterlaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	C. Keterlaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	19		2	D. Keterlaksanaan proses penjaminan mutu internal.	D. Keterlaksanaan proses penjaminan mutu internal.	Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	20	2.3	3	2.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	2.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama, termasuk	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong,	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong,	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong,

					survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.	dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.	Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.	dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.	dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.
p	21	2.4	2	2.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	2.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.
p	22	2.5	1	2.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	2.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama disertai bukti yang sah.

Kriteria 3 Mahasiswa									
i	23	3.1	1	3.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa terkait sistem rekrutmen.	3.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa mencakup: A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.	Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	24		0,5	B. Ketersediaan sistem layanan kepada mahasiswa.	B. Ketersediaan sistem layanan kepada mahasiswa.	Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	25		0,5	C. Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa.	C. Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
p	26	3.2	1	3.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa terkait sistem rekrutmen.	3.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa mencakup: A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa	Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara sangat efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara cukup efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara kurang efektif, disertai bukti yang sah.

					serta pertumbuhan jumlah mahasiswa, sesuai Tabel 3.1 LKPS.				
p	27		1	B. Keterlaksanaan mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.	B. Keterlaksanaan mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.	Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang sangat memadai, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang memadai, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang cukup memadai, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang kurang memadai, disertai bukti yang sah.
p	28		1	C. Keterlaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa.	C. Keterlaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	Terlaksananya upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dengan sangat efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dengan efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dengan cukup efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dengan kurang efektif, disertai bukti yang sah.
p	29	3.3	1	3.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait mahasiswa.	3.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.

p	30	3.4	1	3.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT).	3.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.
p	31	3.5	1	3.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait mahasiswa.	3.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa disertai bukti yang sah.
Kriteria 4 Sumber Daya Manusia									
i	32	4.1	2	4.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM terkait ketersediaan Profil DTPR.	4.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM mencakup: A. Ketersediaan Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan	Tersedianya profil DTPR (kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi) disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya profil DTPR (kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi) disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya profil DTPR (kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi) disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya profil DTPR (kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi) disertai bukti yang kurang sah dan lengkap

					dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).				
i	33		2	B. Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR.	B. Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR.	Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	34		2	C. Ketersediaan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.	C. Ketersediaan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.	Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	35		2	D. Ketersediaan kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR	D. Ketersediaan kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR: a) menjadi <i>visiting lecturer</i> atau <i>visiting scholar</i> di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.	Tersedianya kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR disertai bukti sah dan sangat lengkap.	Tersedianya kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR disertai bukti sah dan lengkap.	Tersedianya kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR disertai bukti sah dan cukup lengkap.	Tersedianya kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR disertai bukti sah dan kurang lengkap.

					<p>d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom</p> <p>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.</p>				
p	36	4.2	6	4.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM terkait Kegiatan DTPR.	4.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM mencakup: A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi, sesuai Tabel 4.1 LKPS.	Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	37		5	B. Keterlaksanaan pengembangan DTPR disertai bukti yang sah.	B. Keterlaksanaan pengembangan DTPR disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan DTPR secara sangat efektif	Terlaksananya pengembangan DTPR secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan DTPR secara cukup efektif	Terlaksananya pengembangan DTPR secara kurang efektif

						disertai bukti yang sah.		disertai bukti yang sah.	disertai bukti yang sah.
p	38		5	C. Keterlaksanaan pengembangan tenaga kependidikan.	C. Keterlaksanaan pengembangan tenaga kependidikan dengan efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan tenaga kependidikan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan tenaga kependidikan secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan tenaga kependidikan secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan tenaga kependidikan secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	39		4	D. Keterlaksanaan kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR.	D. Keterlaksanaan kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR: a) menjadi <i>visiting lecturer</i> atau <i>visiting scholar</i> . b) menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/	Terlaksananya kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR secara sangat efektif disertai bukti sah.	Terlaksananya kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR secara efektif disertai bukti sah.	Terlaksananya kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR secara cukup efektif disertai bukti sah.	Terlaksananya kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR secara kurang efektif disertai bukti sah.

					internasional pada bidang infokom. e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.				
p	40	4.3	10	4.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait SDM.	4.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan SDM, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.
p	41	4.4	4	4.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait SDM.	4.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM.

p	42	4.5	2	4.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terkait SDM.	4.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sSDM disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan SDM disertai bukti yang sah.
Kriteria 5 Keuangan dan Sarana Prasarana									
i	43	5.1	2	5.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT terkait keuangan, sarana, dan prasarana mendukung penyelenggaraan tridarma.	5.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana mencakup: A. Sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	44		2	B. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk	B. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk	Tersedianya pengelolaan sarana	Tersedianya pengelolaan sarana	Tersedianya pengelolaan sarana	Tersedianya pengelolaan sarana

				pembelajaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor.	pembelajaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor.	dan prasarana untuk pembelajaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	dan prasarana untuk pembelajaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor disertai bukti yang sah dan lengkap.	dan prasarana untuk pembelajaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	dan prasarana untuk pembelajaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
p	45	5.2	4	5.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan sistem pengelolaan dana dan pembiayaan mendukung penyelenggaraan tridarma.	5.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana yang mencakup: A. Sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, serta untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma.	Terlaksananya pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, serta untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, serta untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, serta untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, serta untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	46		4	B. Keterlaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM.	B. Keterlaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, serta tingkat kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana, serta tingkat kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran,	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana, serta tingkat kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran,	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana, serta tingkat kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran,	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana, serta tingkat kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran,

					dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, <i>bandwidth</i> , dan bahan pustaka termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor.	penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, <i>bandwidth</i> , dan bahan pustaka termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor secara sangat efektif dan disertai bukti sah.	penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, <i>bandwidth</i> , dan bahan pustaka termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor secara efektif dan disertai bukti sah.	penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, <i>bandwidth</i> , dan bahan pustaka termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor secara cukup efektif dan disertai bukti sah.	penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, <i>bandwidth</i> , dan bahan pustaka termasuk fasilitas belajar mandiri (<i>common room</i>) untuk program Doktor secara kurang efektif dan kurang bukti sah.
p	47	5.3	4	5.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait keuangan, sarana, dan prasarana.	5.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.

p	48	5.4	2	5.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait keuangan, sarana, dan prasarana.	5.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.
p	49	5.5	2	5.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait keuangan, sarana, dan prasarana.	5.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana tanpa disertai bukti yang sah.
Kriteria 6 Pendidikan									
i	50	6.1	2	6.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan Profil Lulusan, CPL sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	6.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI disertai bukti yang	Tersedianya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI disertai bukti yang	Tersedianya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI disertai bukti yang

				(CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	sahih dan sangat lengkap.		sahih dan cukup lengkap.	sahih dan kurang lengkap.
i	51		2	B. Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.	B. Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.	Tersedianya Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	52		2	C. Ketersediaan kebijakan terkait penciptaan suasana akademik.	C. Ketersediaan kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pematkhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui	Tersedianya kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pematkhiran kurikulum; (4)	Tersedianya kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pematkhiran kurikulum; (4)	Tersedianya kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pematkhiran kurikulum; (4)

					kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa di prodi yang diakreditasi.	Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa di prodi yang diakreditasi, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa di prodi yang diakreditasi, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa di prodi yang diakreditasi, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa di prodi yang diakreditasi, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	53		2	D. Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	D. Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	Tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	54		1	E. Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	E. Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Tersedianya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	55		1	F. Ketersediaan mekanisme proses penyelesaian disertasi (publikasi menjadi	F. Ketersediaan mekanisme proses penyelesaian disertasi (publikasi menjadi salah satu syarat kelulusan).	Tersedianya mekanisme proses penyelesaian disertasi disertai bukti yang	Tersedianya mekanisme proses penyelesaian disertasi disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya mekanisme proses penyelesaian disertasi disertai bukti yang	Tersedianya mekanisme proses penyelesaian disertasi disertai bukti yang

				salah satu syarat kelulusan).		sahih dan sangat lengkap.		sahih dan cukup lengkap.	sahih dan kurang lengkap.
p	56	6.2	3	6.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, CPL sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	6.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: A. Proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara sangat efektif disertai bukti sah.	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara efektif disertai bukti sah.	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara cukup efektif disertai bukti sah.	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara kurang efektif disertai bukti sah.
p	57		3	B. Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI.	B. Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan

					dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.	untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan secara efektif disertai bukti yang sah.	untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	58		2	C. Keterlaksanaan suasana akademik.	C. Keterlaksanaan suasana akademik meliputi : (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa di prodi yang diakreditasi.	Terlaksananya suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa	Terlaksananya suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa	Terlaksananya suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa	Terlaksananya suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal; (5) keberadaan syarat publikasi bagi mahasiswa dan kelompok keahlian yang menaungi penelitian mahasiswa

						di prodi yang diakreditasi, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	di prodi yang diakreditasi, secara efektif disertai bukti yang sah.	di prodi yang diakreditasi, secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	di prodi yang diakreditasi, secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	59		2	D. Keterlaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	D. Keterlaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran, secara efektif.	Terlaksananya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran, secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran, secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran, secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	60		3	E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.	E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.	Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	61		3	F. Keterlaksanaan mekanisme proses penyelesaian disertasi (publikasi menjadi salah satu syarat kelulusan).	F. Keterlaksanaan mekanisme proses penyelesaian disertasi (publikasi menjadi salah satu syarat kelulusan).	Terlaksananya proses penyelesaian disertasi secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses penyelesaian disertasi secara efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses penyelesaian disertasi secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses penyelesaian disertasi, secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	62	6.3	10	6.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait pendidikan.	6.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat

					praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.
p	63	6.4	2	6.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait pendidikan.	6.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.
	64	6.5	2	6.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terkait pendidikan.	6.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang	Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan	Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang	Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang

					pendidikan/ pembelajaran.	berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran disertai bukti yang sah.	pendidikan/ pembelajaran disertai bukti yang sah.	berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran disertai bukti yang sah.	berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran disertai bukti yang sah.
Kriteria 7 Penelitian									
i	65	7.1	1	7.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan peraturan terkait keberadaan lembaga penelitian DTPR dan mahasiswa.	7.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR yang mencakup: A. Peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.	Tersedianya peraturan terkait lembaga penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian, disertai bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Tersedianya peraturan terkait lembaga penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian, disertai bukti yang sahih dan lengkap.	Tersedianya peraturan terkait lembaga penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian, disertai bukti yang sahih dan cukup lengkap.	Tersedianya peraturan terkait lembaga penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian, disertai bukti yang sahih dan kurang lengkap.
i	66		1	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.	Tersedianya dokumen pengelolaan penelitian disertai bukti yang	Tersedianya dokumen pengelolaan penelitian disertai bukti yang sahih dan lengkap.	Tersedianya dokumen pengelolaan penelitian disertai bukti yang	Tersedianya dokumen pengelolaan penelitian disertai bukti yang

						sahih dan sangat lengkap.		sahih dan cukup lengkap.	sahih dan kurang lengkap.
i	67		1	C. Ketersediaan mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa.	C. Ketersediaan mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	Tersedianya mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	68		1	D. Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan mahasiswa.	D. Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi	Tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
p	69	7.2	4	7.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan proses pengelolaan lembaga penelitian DTPR dan mahasiswa.	7.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR yang mencakup: A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk

					mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.	menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS secara sangat efektif dan disertai bukti yang sah.	menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS secara efektif dan disertai bukti yang sah.	menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS secara cukup efektif dan disertai bukti yang sah.	menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS secara kurang efektif dan disertai bukti yang sah.
p	70		4	B. Keterlaksanaan pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap.	B. Keterlaksanaan pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan penelitian dengan dokumen yang sangat lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan penelitian dengan dokumen yang cukup lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan penelitian dengan dokumen yang kurang lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.
p	71		3	C. Keterlaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa yang merujuk pada RIP.	C. Keterlaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.	Terlaksananya penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian dilengkapi dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah.	Terlaksananya penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan sah.	Terlaksananya penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian dilengkapi dengan dokumen yang cukup lengkap dan sah.	Terlaksananya penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian dilengkapi dengan dokumen yang kurang lengkap dan sah.
p	72		3	D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan	D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan	D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan	D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan	D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan	D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan

				mahasiswa untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	mahasiswa dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.	mahasiswa dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	mahasiswa dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, secara efektif disertai bukti yang sah.	mahasiswa dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, secara cukup efektif disertai bukti yang sah.	mahasiswa dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, secara kurang efektif disertai bukti yang sah.
p	73	7.3	8	7.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait penelitian DTPR.	7.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR , termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.
p	74	7.4	4	7.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terkait penelitian DTPR.	7.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi

					ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.
p	75	7.5	2	7.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terkait penelitian DTPR.	7.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR disertai bukti yang sah.
Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat									
i	76	8.1	0,25	8.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan peraturan terkait keberadaan lembaga pengelola PkM DTPR.	8.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup: A. Peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri	Tersedianya peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri	Tersedianya peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri	Tersedianya peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri	Tersedianya peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri

					PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM.	atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM disertai bukti yang sah dan lengkap.	atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	77		0,25	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.	Tersedianya dokumen pengelolaan PkM disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.	Tersedianya dokumen pengelolaan PkM disertai bukti yang lengkap dan sah.	Tersedianya dokumen pengelolaan PkM disertai bukti yang cukup lengkap dan sah.	Tersedianya dokumen pengelolaan PkM disertai bukti yang kurang lengkap dan sah.
i	78		0,25	C. Ketersediaan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR.	C. Ketersediaan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.	Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.	Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM disertai bukti yang lengkap dan sah.	Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM disertai bukti yang cukup lengkap dan sah.	Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM disertai bukti yang kurang lengkap dan sah.
i	79		0,25	D. Ketersediaan mekanisme evaluasi kesesuaian PkM DTPR.	D. Ketersediaan mekanisme evaluasi kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM.	Tersedianya mekanisme evaluasi kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM, disertai dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah.	Tersedianya mekanisme evaluasi kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM, disertai dengan dokumen yang lengkap dan sah.	Tersedianya mekanisme evaluasi kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM, disertai dengan dokumen yang cukup lengkap dan sah.	Tersedianya mekanisme evaluasi kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM, disertai dengan dokumen yang kurang lengkap dan sah.
p	80	8.2	0,25	8.2 [PELAKSANAAN] A. Ketersediaan kebijakan, standar,	8.2 [PELAKSANAAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola

				IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR terkait proses pengelolaan lembaga PkM.	berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup: A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM.	PkM DTPR serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM secara sangat efektif dan disertai bukti sah.	PkM DTPR serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM secara efektif dan disertai bukti sah.	PkM DTPR serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM secara cukup efektif dan disertai bukti sah.	PkM DTPR serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM secara kurang efektif dan disertai bukti sah.
p	81		0,25	B. Keterlaksanaan pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap.	B. Keterlaksanaan pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan PkM dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap dan sah, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan PkM dengan dokumen yang cukup lengkap dan sah, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan PkM dengan dokumen yang kurang lengkap dan sah, mulai dari <i>call for proposal</i> hingga laporan akhir.
p	82		0,25	C. Keterlaksanaan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR.	C. Keterlaksanaan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.	Terlaksananya kegiatan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM, yang dilengkapi dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah.	Terlaksananya kegiatan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM, yang dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan sah.	Terlaksananya kegiatan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM, yang dilengkapi dengan dokumen yang cukup lengkap dan sah.	Terlaksananya kegiatan PkM DTPR sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM, yang dilengkapi dengan dokumen yang kurang lengkap dan sah.
p	83		0,25	D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR.	D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan	Terlaksananya monitoring kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil	Terlaksananya monitoring kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil	Terlaksananya monitoring kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil	Terlaksananya monitoring kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil

					hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.	monitoring untuk perbaikan relevansi PkM secara sangat efektif.	monitoring untuk perbaikan relevansi PkM secara efektif.	monitoring untuk perbaikan relevansi PkM secara cukup efektif.	monitoring untuk perbaikan relevansi PkM secara kurang efektif.
p	84	8.3	1	8.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait kegiatan PkM DTPR.	8.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan PkM.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.
p	85	8.4	0,5	8.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terkait kegiatan PkM DTPR.	8.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.
p	86	8.5	0,5	8.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT)	8.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan,	Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan	Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan,	Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan,

				terkait kegiatan PkM DTPR.	penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.	penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR disertai bukti yang sah.	penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR disertai bukti yang sah.	penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR disertai bukti yang sah.	penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR disertai bukti yang sah.
Kriteria 9 Luaran dan Capaian									
i	87	9.1	2	9.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian terkait pendidikan.	9.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HAKI.	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HAKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HAKI disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HAKI disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HAKI disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	88		2	B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di	B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di jurnal	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi

				jurnal internasional yang bereputasi.	internasional yang bereputasi.	penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di jurnal internasional yang bereputasi, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di jurnal internasional yang bereputasi, disertai bukti yang sah dan lengkap.	penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di jurnal internasional yang bereputasi, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di jurnal internasional yang bereputasi, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	89		2	C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.	C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang terkait dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom. disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang terkait dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom. disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang terkait dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom. disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang terkait dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom. disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	90		2	D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.	D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	91		1	E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI .	E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten

						Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan lengkap.	Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	92		2	F. Kegiatan PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	F. Kegiatan PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
i	93		1	G. Kegiatan PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI.	G. Kegiatan PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan lengkap.	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
o	94	9.2	90	9.2 [PELAKSANAAN] A. Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan	9.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup:	Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa,	Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa,	Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa,	Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa,

				luaran dan capaian terkait pendidikan.	A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HAKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HAKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HAKI disertai bukti yang sah dan lengkap.	kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HAKI disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HAKI disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
o	95		20	B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di Jurnal internasional yang bereputasi.	B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di Jurnal internasional yang bereputasi.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di Jurnal internasional yang bereputasi, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di Jurnal internasional yang bereputasi, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di Jurnal internasional yang bereputasi, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom di Jurnal internasional yang bereputasi, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
o	96		20	C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.	C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom disertai bukti yang sah dan lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.

o	97	15	D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.	D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
o	98	15	E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI.	E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
o	99	10	F. Kegiatan PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	F. Kegiatan PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.

o	100		10	G. Kegiatan PkM: jumlah PkM bidang infokom pengakuan HKI.	G. Kegiatan PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan cukup lengkap.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan kurang lengkap.
p	101	9.3	12	9.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait luaran dan capaian tridarma PT.	9.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	Terlaksananya evaluasi secara berkala dan kurang efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.
p	102	9.4	8	9.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait	9.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang cukup lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang kurang lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar

				luaran dan capaian tridarma PT.	dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	(IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	(IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	(IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	(IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.
p	103	9.5	4	9.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait luaran dan capaian tridarma PT.	9.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.	Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara cukup efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi disertai bukti yang sah.	Terlaksananya proses optimalisasi secara kurang efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyesuaian) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi disertai bukti yang sah.
Kriteria D Rencana Pengembangan									
p	104	E.1	2	Kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah	Analisis Capaian Kinerja Kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah yang didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria.	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). 2) konsisten dengan sebagian (5 s.d. 6)	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya tidak sepenuhnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). 2) konsisten dengan

						data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	data institusi yang belum terintegrasi. 2) konsisten dengan sebagian besar (7 s.d. 8) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif dan tepat untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal serta mudah diakses.	kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal.	sebagian kecil (kurang dari 5) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan tidak secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya tidak dipublikasikan.
p	105	E.2	2	Kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman.	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan hasil analisis capaian kinerja. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan program studi yang diakreditasi, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS 2) memiliki keterkaitan	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS, dan 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, namun tidak

					menetapkan program pengembangan.	capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	capaian kinerja, dan 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian.	dengan hasil analisis capaian kinerja.	terstruktur dan tidak sistematis.
p	106	E.3	2	Kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas.	Strategi Pengembangan Kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan VMT UPPS secara keseluruhan, terutama pengembangan program studi yang diakreditasi.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, dan 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, dan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan namun belum mempertimbangan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS, dan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku.
p	107	E.4	2	Program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat	Program Keberlanjutan Program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat dijamin	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai	UPPS memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program	UPPS memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin

				<p>dijamin keberlangsungannya.</p>	<p>keberlangsungannya. Tersedia penjelasan mencakup jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.</p>	<p>peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan <i>stakeholders</i> eksternal. 	<p>peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan. 	<p>yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan. 	<p>keberlanjutan program.</p>
--	--	--	--	------------------------------------	--	---	--	---	-------------------------------

II. BOBOT PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR LAM INFOKOM

No.	Kriteria	Jumlah per Jenis			Jumlah butir	Bobot per jenis			Persentase
		Input	Proses	Output/ Outcome		Input	Proses	Output/ Outcome	
A	Kondisi Eksternal	V			1	4			1,0%
B	Profil Unit Pengelola Program Studi	V			1	4			1,0%
C.1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi								1,0%
	[PENETAPAN]	V			3	1			
	[PELAKSANAAN]		V		1		1		
	[EVALUASI]		V		1		1		
	[PENGENDALIAN]		V		1		0,5		
	[PENINGKATAN]		V		1		0,5		
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama								
	[PENETAPAN]	V			4	2			4,0%
	[PELAKSANAAN]		V		4		8		
	[EVALUASI]		V		1		3		
	[PENGENDALIAN]		V		1		2		
	[PENINGKATAN]		V		1		1		
C.3	Mahasiswa								
	[PENETAPAN]	V			3	2			2,0%

	[PELAKSANAAN]		V		3		3		
	[EVALUASI]		V		1		1		
	[PENGENDALIAN]		V		1		1		
	[PENINGKATAN]		V		1		1		
C.4	Sumber Daya Manusia								
	[PENETAPAN]	V			4	8			11,0%
	[PELAKSANAAN]		V		4		20		
	[EVALUASI]		V		1		10		
	[PENGENDALIAN]		V		1		4		
	[PENINGKATAN]		V		1		2		
C.5	Keuangan, Sarana dan Prasarana								
	[PENETAPAN]	V			2	4			5,0%
	[PELAKSANAAN]		V		2		8		
	[EVALUASI]		V		1		4		
	[PENGENDALIAN]		V		1		2		
	[PENINGKATAN]		V		1		2		
C.6	Pendidikan								
	[PENETAPAN]	V			6	10			10,0%
	[PELAKSANAAN]		V		6		16		
	[EVALUASI]		V		1		10		

	[PENGENDALIAN]		V		1		2		
	[PENINGKATAN]		V		1		2		
C.7	Penelitian								
	[PENETAPAN]	V			4	4			8,0%
	[PELAKSANAAN]		V		4		14		
	[EVALUASI]		V		1		8		
	[PENGENDALIAN]		V		1		4		
	[PENINGKATAN]		V		1		2		
C.8	Pengabdian kepada Masyarakat								
	[PENETAPAN]	V			4	1			1,0%
	[PELAKSANAAN]		V		4		1		
	[EVALUASI]		V		1		1		
	[PENGENDALIAN]		V		1		0,5		
	[PENINGKATAN]		V		1		0,5		
C.9	Luaran dan Capaian								
	[PENETAPAN]	V			7	12			54,0%
	[PELAKSANAAN]			V	7			180	
	[EVALUASI]		V		1		12		
	[PENGENDALIAN]		V		1		8		
	[PENINGKATAN]		V		1		4		

D	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan								2,0%
	Analisis Capaian Kinerja		V		1		2		
	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan		V		1		2		
	Strategi Pengembangan		V		1		2		
	Program Keberlanjutan		V		1		2		
	TOTAL				105	52	168	180	100%
	PERSENTASE					13,0%	42,0%	45,0%	100,0%

III. BOBOT BAGIAN / KRITERIA

No.	Kriteria	Jumlah butir	Bobot dari 400	Bobot %
A	Kondisi Eksternal	1	4	1,0 %
	Sub Total	1	4	1,0%
B	Profil Unit Pengelola Program Studi	1	4	1,0 %
	Sub Total	1	4	1,0%
C.1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	7	4	1,0 %
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	11	16	4,0 %
C.3	Mahasiswa	9	8	2,0 %
C.4	Sumber Daya Manusia	11	44	11,0 %
C.5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	7	20	5,0 %
C.6	Pendidikan	15	40	10,0 %
C.7	Penelitian	11	32	8,0 %
C.8	Pengabdian kepada Masyarakat	11	4	1,0 %
C.9	Luaran dan Capaian	17	216	54,0 %
	Sub Total	99	384	96,0%
D	Analisis dan penetapan program pengembangan	4	8	2,0 %
	Sub Total	4	8	2,0%
	Total	105	400	100%



IV. PERSENTASE INPUT, PROSES, *OUTPUT/OUTCOME*

Jenis	Jumlah Butir	Jumlah Bobot	Persentase
Input	42	52	13,0 %
Proses	56	168	42,0 %
<i>Output/Outcome</i>	7	180	45,0 %